

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

3.1.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2020, 2) mendefinisikan metode penelitian ssebagai berikut:

“Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan penelitian Survey. Menurut Sugiyono (2020, 2) mendefinisikan metode penelitian Kuantitatif sebagai berikut:

“Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Penelitian survey yaitu penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono (2020, 56) mendefinisikan metode penelitian survey adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian survey adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari hipotesis tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan”

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat yaitu Samsat Kabupaten Bandung Barat, Samsat Cimahi, Samsat Kawalayaan, Samsat Pajajaran, dan Samsat Cianjur. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji statistik agar ditemukan fakta dari masing-masing variabel yang diteliti serta diketahui pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.1.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Objek penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak, Insentif Pajak, Modernisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat diantaranya Samsat Kabupaten Bandung Barat, Samsat Cimahi, Samsat Kawalayaan, Samsat Pajajaran, dan Samsat Cianjur.

3.1.3 Pendekatan Penelitian

Dalam ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan akan memperjelas gambaran objek yang diteliti.

Menurut Nazir (2017) definisi deskriptif adalah sebagai berikut :

“Metode deskriptif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka”

Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu Pemeriksaan Pajak, Insentif Pajak, Modernisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel digunakan rumus rata-rata (*mean*).

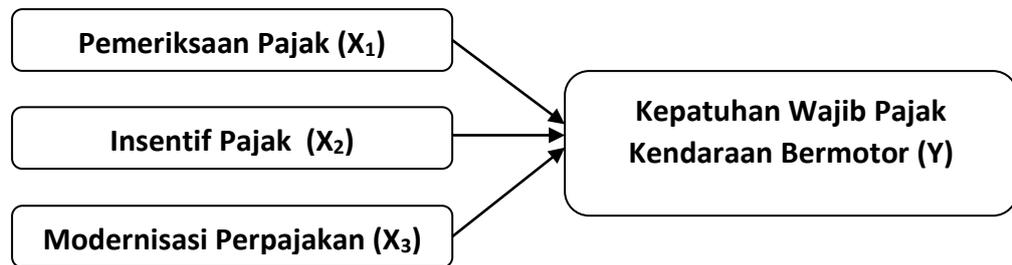
Menurut Sugiyono (2017) definisi verifikatif adalah sebagai berikut:

“Penelitian verifikatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Sementara itu, penelitian verifikatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Samsu, 2017, p. 126). Penelitian verifikatif ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh pemeriksaan pajak, insentif pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Guna mengetahui hal tersebut dilakukan uji hipotesis yaitu dengan uji t (parsial).

3.1.4 Model Penelitian

Metode penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang peneliti kemukakan yaitu: “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” maka untuk menggambarkan hubungan antar variabel independen dan dependen, peneliti memberikan model penelitian yang ditanyakan sebagai berikut :



Keterangan :

—————> : Pengaruh Parsial

Gambar 3. 1
Model Penelitian

3.2 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data. Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2020, 67) adalah sebagai berikut:

“Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”

Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih peneliti yaitu “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Insentif Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, maka peneliti mengelompokkan variabel-variabel dalam judul tersebut dalam 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas (*Independent Variable*) dan variabel terikat (*Dependent Variable*).

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Menurut Sugiyono (2020, 69) definisi variabel bebas adalah sebagai berikut:

“Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus, predictor, antecedent*. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat).”

Maka dalam penelitian ini ada 3 variabel Independen yang diteliti diantaranya:

a. Pemeriksaan Pajak (X1)

Menurut Waluyo (2020, 377-378) Definisi Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan mempunyai tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Maka dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan (standar audit), yang meliputi:

- 1) Standar Umum Pemeriksaan
- 2) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
- 3) Standar Pelaporan hasil pemeriksaan pajak

Menurut Waluyo (2020, 377-378) Dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel Independent (Pemeriksaan Pajak) adalah sebagai berikut :

- 1) Standar Umum Pemeriksaan Pajak

Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak.

- 2) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- 3) Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak
Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan.

b. Insentif Pajak (X2)

Menurut Subiyantoro & Riphath (2020, 28) definisi insentif pajak adalah sebagai berikut :

“Insentif pajak adalah pengeluaran pemerintah tidak langsung, melalui insentif pajak pemerintah tidak langsung mengeluarkan uang melainkan tidak menerima apa yang seharusnya menjadi penerimaan negara serta dalam pemberian insentif, aspek administratif dari pemanfaatan implementasi harus mudah dan andal.”

Menurut Subiyantoro & Riphath (2020, 29-30) Dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel Independent (Insentif Pajak) adalah sebagai berikut :

- 1) Pilar *pertama*, yaitu *simplicity and certainty* (kesederhanaan dan kepastian). Pemberian insentif perpajakan harus sederhana dalam prosedur sehingga tidak menimbulkan *compliance cost* (biaya kepatuhan) yang tinggi bagi wajib pajak. Selain itu, kebijakan insentif harus memberikan kepastian atas hak dan kewajiban fiskus dan wajib pajak.
- 2) Pilar *Kedua*, yaitu implementasi pemberian insentif harus diperkuat dengan *trust and verification* (kepercayaan dan verifikasi) yaitu dengan kepercayaan yang dibangun antara fiskus dan wajib pajak. Dengan paradigma baru tersebut, pemberian insentif pajak akan efektif dan sesuai dengan tujuan. Dalam jangka panjang, insentif perpajakan akan

menjadi lebih menarik sebagai pendorong peningkatan investasi”.

c. Modernisasi Perpajakan (X3)

Menurut Farandy (2018, 126) definisi Modernisasi Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini, program yang dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah struktur organisasi, proses bisnis, dan teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen sumber daya manusia serta good governance”

Menurut Rahayu (2020, 120-125) Dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel Independent (Modernisasi Perpajakan) adalah sebagai berikut:

- 1) Restrukturisasi Organisasi
Restrukturisasi Organisasi elemen strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi sistem administrasi perpajakan dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan Restrukturisasi Organisasi memberikan ruang untuk mendukung adanya fleksibilitas struktur organisasi agar dapat selalu menyesuaikan kondisi dengan adanya perubahan lingkungan yang sangat dinamis, termasuk didalamnya mencakup perkembangan proses bisnis dan perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
- 2) Penyempurnaan proses bisnis
Penyempurnaan *business process* dalam sistem administrasi perpajakan modern mencakup sistem prosedur kerja yang menerapkan *full automation* dengan memanfaatkan TIK
- 3) Penyempurnaan manajemen Sumber Daya Manusia
Disempurnakannya sistem dan manajemen SDM ditujukan agar sistem menjadi lebih baik dan lebih terbuka sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini didukung dengan sistem dan manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja. Dengan sistem dan manajemen SDM yang lebih baik dan

terbuka akan dapat menghasilkan SDM yang juga lebih baik, khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme.

4) Pelaksanaan *Good Governance*

Elemen *good governance* yang seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Menurut Sugiyono (2020, 69) definisi variabel terikat adalah sebagai berikut:

“Variabel terikat adalah variabel yang disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Menurut Rahayu (2019, 193) definisi kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Menurut Widodo (2010, 68-70) Dimensi yang digunakan mengukur untuk variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal
2. Kepatuhan material

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian ke dalam konsep dimensi dan indikator yang akan menjadi bahan penyusunan instrument kuesioner. Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih yaitu “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Insentif Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” terdapat 4 variabel yaitu:

1. Pemeriksaan Pajak sebagai variabel independen (X1)
2. Insentif Pajak sebagai variabel independen (X2)
3. Modernisasi Perpajakan sebagai variabel independen (X3)
4. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel dependen (Y)

Dibawah ini adalah operasionalisasi variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Operasionalisasi Variabel
Variabel Independen : Pemeriksaan Pajak

Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Pemeriksaan mempunyai tujuan untuk menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Maka dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan (standar audit) (Waluyo, 2020, p. 377-378)	Standar Pemeriksaan pajak			
	1. Standar Umum Pemeriksaan	a. Pendidikan	Ordinal	1
		b. Pelatihan	Ordinal	2
		c. Keterampilan pemeriksa pajak	Ordinal	3
		d. Jujur	Ordinal	4
		e. Bersih dari tindakan-tindakan tercela	Ordinal	5
		f. Mengutamakan kepentingan negara	Ordinal	6
g. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan,	Ordinal	7		

		termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan		
	1. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak	a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan	Ordinal	8
		b. Mendapat pengawasan seksama	Ordinal	9
		c. Luas lingkup pemeriksaan (audit <i>scope</i>) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling	Ordinal	10
		d. Pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan	Ordinal	11
		e. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup	Ordinal	12
		f. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Ordinal	13
		g. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja	Ordinal	14
		h. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan	Ordinal	15
		i. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak	Ordinal	16

	3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak	a. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas	Ordinal	17
		b. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara jelas	Ordinal	18
		c. Memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan.	Ordinal	19
		d. Laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai penugasan pemeriksaan, identitas Wajib Pajak, pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data/informasi yang tersedia, buku, dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan, penghitungan pajak terutang, simpulan dan usul pemeriksa pajak.	Ordinal	20

(Waluyo, 2020, pp. 377-378)

Tabel 3. 2

Operasionalisasi Variabel

Variabel Independen : Insentif Pajak

Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Insentif pajak adalah pengeluaran pemerintah tidak langsung, melalui insentif pajak pemerintah	1. <i>Simplicity and certainty</i> (kesederhanaan dan kepastian).	a. Pemberian insentif perpajakan harus sederhana dalam prosedur sehingga tidak	Ordinal	21

tidak langsung mengeluarkan uang melainkan tidak menerima apa yang seharusnya menjadi penerimaan negara, serta dalam pemberian insentif, aspek administratif dari pemanfaatan implementasi harus mudah dan andal. (Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath, 2020, p. 28)		menimbulkan <i>compliance cost</i> (biaya kepatuhan) yang tinggi bagi wajib pajak. b. Kebijakan insentif harus memberikan kepastian atas hak dan kewajiban antara fiskus dan wajib pajak.	Ordinal	22
	2. <i>Trust and verification</i> (kepercayaan dan verifikasi)	a. Kepercayaan yang dibangun antara fiskus dan wajib pajak.	Ordinal	23
		b. Tindakan pengawasan melalui verifikasi	Ordinal	24

(Subiyantoro dan Riphath, 2020, pp. 29-30)

Tabel 3. 3

Operasionalisasi Variabel

Variabel Independen : Modernisasi Perpajakan

Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Modernisasi sistem administrasi Perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini, program yang dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi komunikasi dan manajemen sumber daya manusia serta good governance (Farandy, 2018, p.126)	1. Restruktur Organisasi	a. Debirokratis Pelayanan	Ordinal	25
		b. Struktur Organisasi	Ordinal	26
	2. Penyempurnaan Proses Bisnis melalui pemanfaatan	a. Standar Operating Procedures (SOP)	Ordinal	27
		b. Fasilitas Pelayanan	Ordinal	28

	teknologi komunikasi dan informasi	c. Pelayanan digital d. Infrastruktur yang memadai e. Sistem administrasi digital	Ordinal Ordinal Ordinal	29 30 31
	3. Penyempurnaan sumber daya manusia	a. Melakukan pemetaan kompetensi b. Seluruh jabatan dievaluasi c. Beban kerja dari masing-masing jabatan dianalisis d. Semuanya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal	32 33 34 35
	4. Pelaksanaan Good Governance	a. Pembuatan kode etik pegawai b. Penegakan kode etik pegawai c. Sanksi tegas terhadap pelanggaran	Ordinal Ordinal Ordinal	36 37 38

(Rahayu, 2020, pp.120-125)

Tabel 3. 4

Operasionalisasi Variabel

Variabel Independen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Konsep	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan	1. Keptuhan Formal	a. Kesadaran wajib pajak mendaftarkan diri	Ordinal	39
		b. Tepat waktu dalam membayar pajak	Ordinal	40
		c. Tepat waktu dalam melaporkan pembayaran pajak		
	2. Kepatuhan Material	a. Wajib pajak mengisi SPT dengan jujur	Ordinal	41
b. Wajib pajak mengisi SPT dengan benar		Ordinal	42	

undang-undang pajak yang berlaku. (Siti Kurnia Rahayu, 2019, pp. 193)		c. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan		43
--	--	---	--	----

(Widodo, 2010, pp. 68-70)

Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan ukuran tertentu yang telah ditetapkan pada alternative jawaban dalam kuesioner. Macam-macam skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval dan skala rasio dari skala penukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal interval dan rasio (Sugiyono, 2020, 93).

Penelitian ini menggunakan ukuran ordinal. Ukuran ordinal adalah angka maupun variabel terikat akan diukur oleh sesuatu instrument penelitian dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2020, 146) definisi skala likert adalah sebagai berikut:

“Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian”

Dari setiap jawaban akan diberi skor, dimana hasil skor akan menghasilkan skala pengukuran ordinal. Untuk variabel X1 (Pemeriksaan Pajak), X2 (Insentif Pajak), X3 (Modernisasi Perpajakan) dan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor). Untuk lebih jelasnya, berikut ini kriteria bobot penilaian dari setiap pernyataan dalam kuesioner yang dijawab responden, dapat dilihat pada table 3.5 berikut :

Tabel 3. 5
Instrumen Penelitian Kuesioner

No	Jawaban Responden	Skor
1.	Sangat Setuju/Selalu/Sangat Positif	5
2.	Setuju/Sering/Positif	4
3.	Ragu-Ragu/Kadang-Kadang/Netral	3
4.	Tidak Setuju/Pernah/Negatif	2
5.	Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah/Tidak ada	1

Sumber: Sugiyono (2020, 147)

Instrument penelitian yang menggunakan likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Namun pada penelitian ini peneliti menggunakan bentuk checklist agar lebih efisien dalam mengisi kuesioner tersebut.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2020, 126) definisi populasi adalah sebagai berikut:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek itu.

Dalam penelitian ini populasi penelitiannya adalah subjek yang berhubungan dengan Pemeriksaan Pajak, Insentif Pajak, Modernisasi Perpajakan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 5 Samsat Provinsi Jawa Barat diantaranya, Samsat Kabupaten Bandung Barat, Samsat Cimahi, Samsat Kawalayaan, Samsat Pajajaran dan Samsat Cianjur.

Tabel 3. 6
Jumlah Populasi

No	Samsat	Petugas Pajak
1.	Samsat Kabupaten Bandung Barat	9
2.	Samsat Cimahi	8
3.	Samsat Kawalayaan	8
4.	Samsat Pajajaran	9
5.	Samsat Cianjur	8
	Total Petugas Pajak	42

3.3.2 Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2020, 127) definisi sampel adalah sebagai berikut :

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian.”

Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus mewakili (representatif).

Menurut Arikunto (2012, 104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya

lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka peneliti mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 42 orang responden. Dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sensus.

3.3.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2020, 128) definisi teknik sampling adalah sebagai berikut:

“Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.”

Menurut Sugiyono (2020, 129) terdapat dua teknik sampling yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Probability Sampling*
Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random, sampling area (cluster) sampling* (sampling menurut daerah)
2. *Non Probability Sampling*
Non Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball.”

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang peneliti gunakan adalah nonprobability sampling dengan teknik yang diambil yaitu sampling jenuh (sensus).

Menurut Sugiyono (2014, 118) definisi teknik sampling jenuh adalah sebagai berikut :

“Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.”

Maka dari itu, Peneliti memilih sampel menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil. Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 42 orang.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Berdasarkan sumbernya yang dikutip dalam Sugiyono (2020, 194), data dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer yang diperoleh dari hasil penelitian langsung secara empiris kepada pelaku langsung atau yang terlibat langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil penelitian pihak lain.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pada 5 Samsat Provinsi Jawa Barat di Samsat Kabupaten Bandung Barat, Samsat Cimahi, Samsat Kawalayaan, Samsat Pajajaran dan Samsat Cianjur.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara interview (wawancara), observasi (pengamatan), kuesioner (angket) dan gabungan ketiganya, Sugiyono (2020, 194).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan cara untuk memperoleh data primer yang secara langsung melibatkan pihak responden dan dijadikan sampel dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan membagikan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan mengenai variabel-variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian ini. Kuesioner ini akan dibagikan kepada responden yang secara logis berhubungan dengan Pemeriksaan Pajak, Insentif Pajak dan Modernisasi Perpajakan yang ada di 5 Samsat Provinsi Jawa Barat. Samsat Kabupaten Bandung Barat, Samsat Cimahi, Samsat Kawalayaan, Samsat Pajajaran, dan Samsat Cianjur.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020, 206) menjelaskan analisis data sebagai berikut:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabilasi data berdasarkan variabel variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan”.

Adapun analisis data yang dilakukan peneliti meliputi analisis deskriptif dan analisis verifikatif sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif
 - a. Menganalisis Pemeriksaan Pajak
 - b. Menganalisis Insentif Pajak
 - c. Menganalisis Modernisasi Perpajakan
 - d. Menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2. Analisis Verifikatif
 - a. Menganalisis seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
 - b. Menganalisis seberapa besar pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
 - c. Menganalisis seberapa besar pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam menentukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya yang nantinya dapat dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner, dimana yang diteliti adalah sampel yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Menyusun pernyataan atau kuesioner.
2. Daftar kuesioner kemudian disebar ke bagian-bagian yang telah ditetapkan. Setiap item dari masing-masing indikator akan dijabarkan kepada bagian yang bersangkutan dengan masalah yang diuji, dimana masing-masing indikator memiliki lima jawab dengan masing-masing

nilai berbeda, tiap jawaban akan diberi skor, dimana hasil skor menghasilkan skala pengukuran ordinal. Tiap jawaban dibutuhkan skor 1 sampai dengan 5.

3. Apabila data telah terkumpul, kemudian dilakukam pengolahan data, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji statistic. Untuk menilai variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y , maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden.

Untuk menilai variabel X dan variabel Y , maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (mean) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan dan keseluruhan dalam setiap variabel kemudian dibagi dalam jumlah responden. Rumus rata-rata (*mean*) yang dikutip oleh Sugiyono (2020, 247) adalah sebagai berikut :

$$me = \frac{\sum Xi}{n} \quad me = \frac{\sum Yi}{n}$$

Keterangan:

Me = Mean (rata – rata)

\sum = Sigma (jumlah)

X_i = Nilai X ke i sampai ke n

Y_i = Nilai Y ke I sampai ke n

N = Jumlah Individu

Persamaan rata-rata (mean) di atas merupakan teknik penjelasan kelompok didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata ini didapat dengan

menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut.

Setelah didapat rata-rata dari masing-masing variabel kemudian dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan nilai tertinggi itu masing-masing peneliti diambil dari banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikaitkan dengan nilai terendah (1) dan nilai tertinggi (5).

Berdasarkan nilai tertinggi dan terendah tersebut, maka dapat ditentukan rentang interval yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kriteria. Berdasarkan nilai tertinggi dan terendah tersebut, maka dapat ditentukan rentang interval yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kriteria, menyatakan bahwa :

1. Tentukan rentang, ialah data terbesar yang dikurangi data terkecil.
2. Tentukan banyak kelas interval yang diperlukan. Banyak kelas sering diambil paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas, dipilih menurut keperluan. Cara lain yang cukup bagus untuk n berukuran besar $n > 200$, misalnya dapat menggunakan aturan *sturges*, yaitu banyak kelas = $1 + (3,3) \log n$.
3. Tentukan panjang kelas interval p
4. Pilih ujung bawah kelas interval pertama. Untuk ini bias diambil sama dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil tetapi selisihnya harus kurang dari Panjang kelas yang ditentukan.

Dengan demikian maka akan dapat ditentukan Panjang interval kelas masing-masing variabel adalah :

a. Kriteria untuk menilai Pemeriksaan Pajak (X_1)

Untuk menilai variabel pemeriksaan pajak dengan banyaknya pernyataan dalam kuesioner adalah 24 persyaratan, sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 24) = 120$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 24) = 24$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut :

$$\frac{120 - 24}{5} = 19,2$$

Maka, kriteria untuk nilai variabel pemeriksaan pajak (X_1) adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7
Kriteria Pemeriksaan Pajak

Rentang Nilai	Kriteria
24 – 43,2	Tidak Sesuai
43,2 – 62,4	Kurang Sesuai
62,4 – 81,6	Cukup Sesuai
81,6 – 100,8	Sesuai
100,8 – 120	Sangat Sesuai

b. Kriteria untuk menilai Insentif Pajak (X_2)

Untuk menilai variabel Insentif Pajak dengan banyaknya persyaratan dalam kuesioner adalah 9 persyaratan, sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 9) = 45$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 9) = 9$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut:

$$\frac{45 - 9}{5} = 7,2$$

Maka, kriteria untuk variabel Insentif Pajak (X_2) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Kriteria Insentif Pajak

Rentang Nilai	Kriteria
9 – 16,2	Sangat Sulit
16,2 – 23,4	Sulit
23,4 – 30,6	Cukup Mudah
30,6 – 37,8	Mudah
37,8 – 45	Sangat Mudah

c. Kriteria untuk menilai Modernisasi Perpajakan (X_3)

Untuk menilai variabel Modernisasi Perpajakan dengan banyaknya persyaratan dalam kuesioner adalah 16 persyaratan, sehingga :

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 16) = 80$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 16) = 16$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut :

$$\frac{80 - 16}{5} = 12,8$$

Maka, kriteria untuk nilai variabel Modernisasi Perpajakan (X_3) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9
Kriteria Modernisasi Perpajakan

Rentang Nilai	Kriteria
16 – 28,8	Tidak Modern
28,8 – 41,6	Kurang Modern
41,6 – 54,4	Cukup Modern
54,4 – 67,2	Modern
67,2 – 80	Sangat Modern

- d. Kriteria untuk menilai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Untuk menilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan banyaknya persyaratan dalam kuesioner adalah 16 persyaratan, sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 16) = 80$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 16) = 16$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut :

$$\frac{80 - 16}{5} = 12,8$$

Maka, kriteria untuk menilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 10
Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Rentang Nilai	Kriteria
---------------	----------

16 – 28,8	Tidak Patuh
28,8 – 41,6	Kurang Patuh
41,6 – 54,4	Cukup Patuh
54,4 – 67,2	Patuh
67,2 – 80	Sangat Patuh

3.5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Validitas dan reabilitas instrumen penelitian merupakan hal yang utama dalam meningkatkan efektifitas proses pengumpulan data. Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran kuesioner instrument-instrument penelitian tersebut sudah valid dan reliabel (*reliable*), yang artinya alat ukur untuk mendapatkan data sudah dapat digunakan.

3.5.2.1 Uji Validitas Instrumen

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2020, pp. 175-176).

Untuk menguji validitas pada tiap-tiap item, yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Koefisien korelasi yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan standar validasi yang berlaku. Menurut Sugiyono (2020, 189-190) sebagai berikut :

- a. Jika $r \geq 0,30$, maka item instrumen dinyatakan valid
- b. Jika $r \leq 0,30$, maka item intrumen dinyatakan tidak valid

Uji validitas instrumen dapat menggunakan rumus korelasi. Rumus korelasi berdasarkan *Pearson Product Moment* adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X \cdot \sum Y)}{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi pearson

$\sum XY$ = Jumlah perkalian variabel X dan Y

$\sum X$ = Jumlah Variabel X

$\sum Y$ = Jumlah Variabel Y

$\sum X^2$ = Jumlah pangkat dua nilai variabel X

$\sum Y^2$ = Jumlah pangkat dua nilai variabel Y

n = Banyaknya sampel

3.5.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari *reliability*, pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut pengukuran yang reliabel (*reliable*). Meskipun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, keterhandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini peneliti menggunakan *cronbach's alpha* yang dikutip dalam Ety (2007, 54) dengan menggunakan *software* SPSS yang dirumuskan sebagai berikut :

$$a = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum a_i^2}{a_x^2}\right)$$

Keterangan:

K = Jumlah soal atau pertanyaan

a_i^2 = Variasi setiap pertanyaan

a_x^2 = Variasi total tes

$\sum a_i^2$ = Jumlah seluruh variansi setiap soal atau pertanyaan

Pemberian interpretasi terhadap reliabilitas variabel dapat dikatakan reliabel jika koefisien variabelnya lebih dari 0,6. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrument penelitian dinyatakan tidak reliabel. Apabila dalam uji coba instrument ini sudah valid dan *reliable*, maka dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

3.5.3 Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval

Menstransformasikan data dari ordinal ke interval gunanya untuk memenuhi sebagian dari syarat analisis parametrik yang mana data setidaknya berkala interval. Teknik informasi yang paling sederhana dengan menggunakan MSI (*Method of Successive Interval*) adalah sebagai berikut :

1. Perhatikan banyaknya (frekuensi) responden yang menjawab (memberikan) respon terhadap alternative (kategori) jawaban yang tersedia.
2. Bagi setiap bilangan pada frekuensi oleh banyaknya responden (n), kemudian tentukan proporsi untuk setiap alternative jawaban responden tersebut.

3. Jumlahkan proporsi secara berurutan sehingga keluar proporsi kumulatif untuk setiap alternative jawaban responden.
4. Dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, hitung nilai z untuk setiap kategori berdasarkan proporsi kumulatif pada setiap alternative jawaban responden.
5. Menghitung nilai skala untuk z dengan menggunakan rumus:

$$SV = \frac{(\text{densitas pada batas bawah} - \text{densitas pada batas atas})}{(\text{area di bawah batas atas} - \text{area di bawah batas bawah})}$$

6. Melakukan transformasi nilai skala dari nilai skala ordinal ke nilai skala interval, dengan rumus:

$$Y = S_{vi} + [SV_{\min}]$$

Mengubah *Scala Value* (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (=1) dan mentransformasikan masing – masing skala menurut perubahan skala terkecil diperoleh *Transformed Scaled Value*.

3.6 Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.6.1 Rancangan Analisis

Rancangan analisis untuk mengetahui korelasi dari empat variabel yang diteliti, dalam lingkup penelitian pengaruh pemeriksaan pajak, insentif pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah dengan perhitungan statistik.

Menurut Sugiyono (2020, 99) definisi hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari variable yang diteliti. Tahap-tahap dalam rancangan pengujian hipotesis ini dimulai dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a), pemilihan tes statistic, perhitungan nilai statistic dan penetapan tingkat signifikan.

1. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen (Sugiyono, 2020, p.280).

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Analisis regresi linier berganda (Sugiyono, 2020, p. 283) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Variabel Terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor)

a = Bilangan Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

X_1 = Pemeriksaan Pajak

X_2 = Insentif Pajak

X_3 = Modernisasi Perpajakan

2. Uji Korelasi Parsial

Analisis ini digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara variable X_1 , X_2 , dan X_3 dengan Y secara bersamaan, adapun rumus korelasi ganda menurut Sugiyono (2020, 246) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X \cdot \sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = Koefisien Korelasi pearson (product moment)

$\sum XY$ = Jumlah perkalian variabel x dan y

$\sum x$ = jumlah nilai variabel x

$\sum y$ = jumlah nilai variabel y

$\sum x^2$ = jumlah pangkat dua nilai variabel x

$\sum y^2$ = jumlah pangkat dua nilai variabel y

n = banyaknya sampel

Berdasarkan nilai r yang diperoleh, maka dapat dihubungkan $-1 < r < 1$ yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila $r = 1$, artinya terdapat hubungan antara variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Variabel Y .
- b. Apabila $r = -1$, artinya terdapat hubungan antara variabel negative
- c. Apabila $r = 0$, artinya tidak terdapat hubungan korelasi.

Sementara itu, untuk melihat taksiran besarnya hubungan atau korelasi antara variabel, ditunjukkan pada tabel 3.11 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 11

Interprestasi Koefisien Korelasi

Besarnya Pengaruh	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat Lemah
0,200 – 0,399	Lemah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat Kuat

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya. Uji signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial menggunakan uji T.

3.6.2.1 Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan membandingkan t tabel t hitung. Masing-masing t hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t tabel yang diperoleh dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05. Berikut ini rumus uji t secara parsial menurut Sugiyono (2020, 248) sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Keterangan :

t = Nilai uji

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah data

Model pengambilan keputusan dalam penelitian ini, ditentukan menggunakan statistik uji t dengan melihat asumsi sebagai berikut :

1. Peranan variabel independen terhadap variabel dependen diuji dengan taraf kepercayaan 95% atau interval keyakinan (α) sebesar 0,05.
2. Derajat kebebasan (dk) = $n - k$
3. Kriteria pengambilan keputusan yaitu dengan masing-masing t hasil perhitungan, kemudian dibandingkan dengan t tabel.
 - a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (terima H_a)
 - b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima (tolak H_a)

Pengujian secara individu untuk melihat pengaruh masing-masing variabel sebab terhadap variabel akibat. Pengujian pengaruh parsial dilakukan uji satu arah (one tail test) yaitu uji pihak kanan dengan rumusan hipotesis sebagai berikut :

$H_0: \beta_1 \leq 0$ artinya Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

$H_a: \beta_1 > 0$ artinya Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

$H_0: \beta_2 \leq 0$ artinya Insentif Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

$H_a: \beta_2 > 0$ artinya Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

$H_0: \beta_3 \leq 0$ artinya Modernisasi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

$H_0: \beta_3 > 0$ artinya Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

3.6.2.2 Koefisien Determinan

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinan, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X_1 (Pemeriksaan Pajak), X_2 (Insentif Pajak), X_3 (Modernisasi Perpajakan) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).

Berdasarkan Sugiyono (2020, 249) koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$kd = r^2 \times 100$$

Keterangan :

Kd = Koefisien determinan atau seberapa jauh perubahan variabel terikat.

R_j = Koefisien korelasi

Koefisien Determinan (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing – masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Nilai KD yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independent yaitu Pemeriksaan Pajak, Insentif Pajak dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam

presentase. Proses pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan *Statistic Program for Social Science (SPSS) 25*.

3.7 Rancangan Kuesioner

Menurut Sugiyono (2020, 199) definisi Kuesioner adalah sebagai berikut:

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya”.

Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Rancangan kuesioner yang dibuat peneliti adalah kuesioner tertutup dimana jawaban dibatasi atau sudah ditentukan oleh peneliti, jumlah kuesioner ditentukan berdasarkan indikator variabel penelitian. Peneliti menggunakan jenis kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang dibagikan sudah disediakan jawaban sehingga responden tinggal memilih kuesioner terdiri dari 65 pernyataan yaitu 24 pernyataan mengenai pemeriksaan pajak, 9 pernyataan mengenai insentif pajak, 16 mengenai modernisasi perpajakan dan 16 pernyataan mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.